

## Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor Tahun 2023

Rifa Dwi Ekalaya<sup>1</sup>, Alifa Nisrina K<sup>2</sup>, Ahmad Dinar<sup>3</sup>, Eri Siti Lisdiawanti<sup>4</sup>, Rio Rifaldo<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [rifa.dwi\\_mn23@nusaputra.ac.id](mailto:rifa.dwi_mn23@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra dan [alifa.nisrina\\_mn23@nusaputra.ac.id](mailto:alifa.nisrina_mn23@nusaputra.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Nusa Putra dan [ahmad.dinar\\_mn23@nusaputra.ac.id](mailto:ahmad.dinar_mn23@nusaputra.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Nusa Putra dan [eri.siti\\_mn23@nusaputra.ac.id](mailto:eri.siti_mn23@nusaputra.ac.id)

<sup>5</sup> Universitas Nusa Putra dan [rio.rifaldo\\_mn23@nusaputra.ac.id](mailto:rio.rifaldo_mn23@nusaputra.ac.id)

---

### ABSTRAK

---

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penerapannya dari anggaran pendapatan dan biaya daerah antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Data yang digunakan untuk penelitian ini termasuk APBD Pemerintah Daerah (LKPD) masing-masing kabupaten. Metode analisis yang digunakan adalah uji hipotesis untuk melihat perbedaan signifikan antara realisasi pendapatan dan pengeluaran kedua kabupaten. Hasil dari uji independent sampel t-test untuk mengetahui perbedaan signifikan antara pendapatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor diketahui bahwa *Sig.(2-tailed)* sebesar  $0,161 > 0,05$ , dan untuk hasil uji independent sampel t-test untuk mengetahui perbedaan signifikan antara pengeluaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor diketahui bahwa *Sig.(2-tailed)* sebesar  $0,164 > 0,05$  yang artinya bahwa dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari kedua kabupaten tersebut tidak terdapat perbedaan secara signifikan. Rata-rata realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Sukabumi adalah 125.440.315,4 sedangkan untuk Kabupaten Bogor adalah 275.115.238,5. Meskipun terdapat perbedaan dalam angka tersebut, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam analisis efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di masing-masing kabupaten. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang strategi pengelolaan keuangan daerah dan dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan keuangan yang lebih efektif di masa mendatang.

**Kata Kunci:** APBD, Realisasi Anggaran, Pendapatan Daerah, Pengeluaran Daerah

### ABSTRACT

---

This study aims to compare the realization of the Regional Budget (APBD) between Sukabumi Regency and Bogor Regency in 2023. The data used in this study includes APBD data obtained from the Regional Government Financial Statements (LKPD) of each district. The method of analysis used is hypothesis testing to see the significant difference between the realization of revenue and expenditure of the two districts. The results of the independent sample t-test to determine the significant difference between the revenues of Sukabumi Regency and Bogor Regency showed that *Sig. (2-tailed)* of  $0.161 > 0.05$ , and for the results of the independent sample t-test to determine the significant difference between the expenditures of Sukabumi Regency and Bogor Regency showed that *Sig. (2-tailed)* of  $0.164 > 0.05$ , which means that in the realization of the regional revenue and expenditure budgets of the two districts there is no significant difference. The average realization of government expenditure for Sukabumi District was 125,440,315.4 while that for Bogor District was 275,115,238.5. Although there was a difference in these figures, the difference was not statistically significant. The implication of this study is the need for further research to obtain more accurate results in analyzing the effectiveness of regional revenue management in each district. This research contributes to improving understanding of regional financial management strategies and can assist local governments in designing more effective financial policies in the future.

**Keywords:** APBD, Budget Realization, Regional Revenue, Regional Expenditure

---

## PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan mulai berlaku setelah ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahunannya. Kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak dimasukkan dalam APBD.

Menurut Mahsun (2011: 81), APBD adalah suatu daftar yang mencatat secara rinci pendapatan dan pengeluaran suatu daerah selama satu tahun dan ditentukan oleh peraturan daerah untuk seluruh tahun anggaran. APBD yang baik dapat berfungsi sebagai sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian bagi instansi pemerintah. Hal ini memerlukan kepemimpinan yang efektif dan efisien untuk menjalankan lembaga-lembaga pemerintah dengan baik dan memastikan bahwa tujuan pembangunan tercapai secara efektif. APBD merupakan alat yang penting dalam hal ini. Guna mencapai target belanja fiskal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor wajib menyusun laporan keuangan secara tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mewajibkan pelaporan akuntansi APBD harus konsisten dengan SAP. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah. APBD berfungsi sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan, memungkinkan pemerintah daerah mengelola dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif, dan merupakan alat untuk memantapkan, mendistribusikan, mengalokasikan, merencanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi kinerja sumber daya publik.

Pendahuluan Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan realisasi pendapatan daerah yang signifikan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Menganalisis perbedaan ini penting karena memberikan gambaran efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di masing-masing kabupaten. Memahami perbedaan pengakuan pendapatan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, seperti potensi pendapatan, kebijakan keuangan, dan efisiensi administrasi. Analisis ini juga membantu menentukan apakah suatu daerah berhasil memaksimalkan aliran pendapatannya dibandingkan dengan daerah lain, sehingga memberikan wawasan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi pengelolaan keuangan di masa depan.

Berikut laporan realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor menurut jenis pendapatan tahun 2023 (juta rupiah).

Gambar 1. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI	2023	REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI	2023
PENDAPATAN DAERAH	4.117.862	BELANJA DAERAH	4.168.281
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	668.361	Belanja Operasi	2.977.297
Pajak Daerah	289.197	Belanja Pegawai	1.399.012
Retribusi Daerah	17.155	Belanja Barang Jasa	1.403.828
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.166	Belanja Bunga	
Lain-lain PAD yang Sah	350.842	Belanja Subsidi	
Pendapatan Transfer	3.409.152	Belanja Hibah	157.183
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.114.732	Belanja Bantuan Sosial	17.275
Pendapatan Transfer Antar Daerah	294.420	Belanja Modal	493.352
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40.349	Belanja Tidak Terduga	25.000
Pendapatan Hibah/Dana Darurat	40.349	Belanja Transfer	672.631
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan		Belanja Bagi Hasil	35.292
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	126.654	Belanja Bantuan Keuangan	637.339
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		PENGELUARAN PEMBIAYAAN	76.235
TOTAL	4.244.516	TOTAL	4.244.516

Gambar 2. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2023

REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR	2023	REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR	2023
PENDAPATAN DAERAH	8.549.987	BELANJA DAERAH	9.192.814
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.427.142	Belanja Operasi	6.300.329
Pajak Daerah	2.502.530	Belanja Pegawai	2.785.072
Retribusi Daerah	158.455	Belanja Barang Jasa	3.059.337
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75.297	Belanja Bunga	
Lain-lain PAD yang Sah	690.860	Belanja Subsidi	
Pendapatan Transfer	5.066.104	Belanja Hibah	424.986
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.113.239	Belanja Bantuan Sosial	30.935
Pendapatan Transfer Antar Daerah	952.866	Belanja Modal	1.255.978
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	56.741	Belanja Tidak Terduga	50.298
Pendapatan Hibah	20	Belanja Transfer	1.586.209
Dana Darurat		Belanja Bagi Hasil	222.435
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.721	Belanja Bantuan Keuangan	1.363.774
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	792.828	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	150.000
TOTAL	9.342.814	TOTAL	9.342.814

## LANDASAN TEORI

### A. Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2007), pendapatan daerah mengacu pada seluruh dana yang diterima pemerintah daerah dalam bentuk uang tunai yang memajukan kesejahteraan daerah pada tahun anggaran tertentu dan tidak memerlukan pengembalian dana tersebut. Darise (2008) mengelompokkan pendapatan daerah menjadi tiga kelompok.

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah dan terdiri dari berbagai sumber:

- 1) Pajak Daerah: Ini adalah kontribusi yang wajib dibayar oleh seseorang atau organisasi kepada pemerintah daerah tanpa menerima imbalan langsung yang setara. Pajak ini dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

- 2) Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan kepada pemerintah daerah atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan dan diatur oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat atau pihak tertentu.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan: Termasuk bagian keuntungan penyertaan modal negara pada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau swasta, dan kelompok usaha kota.
- 4) Pendapatan daerah lainnya : Golongan ini mencakup pendapatan daerah lainnya yang bukan merupakan hasil pajak daerah, retribusi daerah, atau pengelolaan kekayaan daerah tersendiri.

## **2. Pendapatan Lain Yang Sah**

Termasuk di dalamnya sumbangan atau bantuan dari pemerintah, dana darurat pemerintah untuk bantuan korban atau pemulihan bencana alam, yang disalurkan ke kabupaten/kota berdasarkan dana penerimaan pajak pemerintah pusat, dana adaptasi dan dukungan keuangan dari pemerintah. pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya.

## **3. Belanja Daerah**

Belanja daerah adalah semua pengeluaran tunai yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun anggaran tertentu yang mengurangi jumlah dana yang ada dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Belanja daerah terbagi dalam tiga kategori utama. (1) Belanja daerah, yaitu belanja yang memberikan manfaat tidak langsung kepada masyarakat tetapi diakui langsung oleh pegawai dan instansi tata usaha negara. (2) Belanja pelayanan publik, belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat umum. (3) beban bagi hasil dan hibah, yaitu beban yang berkaitan dengan penyaluran dana atau hibah kepada perusahaan lain.

### **B. Perencanaan Anggaran**

Menurut Suandy (2011: 2), perencanaan anggaran diartikan sebagai: "Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan organisasi dan dengan jelas menguraikan taktik, strategi, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai atau memungkinkan tujuan keseluruhan organisasi tercapai." Menurut Muhammad Munandar (2012: 136), pengertian perencanaan anggaran adalah: "Rencana adalah rencana yang disusun secara sistematis yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu."

### **C. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pelaksanaan laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 dan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 24. Beberapa Laporan Keuangan Pemerintah Laporan yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah oleh entitas pelapor selama periode tertentu. Menurut Dedi Nordiawan, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja merupakan laporan yang merangkum sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah (baik pusat maupun daerah) selama periode pelaporan, termasuk alokasi dan penggunaannya.

#### **D. Analisis Pendapatan**

Mahmudi (2010) menekankan bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian keuangannya dari perspektif otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Artinya, pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungannya terhadap dukungan finansial dari pemerintah pusat dan daerah melalui dana transfer.

##### **1. Analisis Penyimpangan Pendapatan Anggaran**

Analisis penyimpangan pendapatan daerah dilakukan dengan membandingkan pendapatan aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jika pendapatan aktual melebihi anggaran, ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Namun jika realisasi pendapatan lebih kecil dari anggaran maka perkembangan keuangan pendapatan daerah dinilai kurang baik (Mahmudi, 2010: 137).

##### **2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan**

Analisis ini membantu menilai apakah kinerja keuangan suatu pemerintah daerah mengalami pertumbuhan positif atau negatif pada tahun atau periode anggaran tertentu. Pertumbuhan positif menunjukkan peningkatan kinerja keuangan pendapatan dan pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan pendapatan (Mahmudi, 2010).

##### **3. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah**

Menurut Mahmudi (2011), rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan target anggaran. Halim (2012) menambahkan kinerja daerah dikatakan efektif jika tingkat efektivitasnya mencapai 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut.

#### **E. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Erlina (2015: 19), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dilakukan. Laporan keuangan yang dihasilkan hendaknya disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Nasional, laporan keuangan adalah suatu dokumen sistematis mengenai keadaan keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelapor.

Berdasarkan judul dari penelitian diatas maka selanjutnya akan dapat diuraikan hipotesis penelitian ini, yaitu:

### **Hipotesis Penelitian**

1. H0 (Hipotesis Nol): Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023.
2. H1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat perbedaan yang signifikan dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi komparatif. Tujuan penelitian komparatif adalah untuk membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Penelitian ini menggunakan jenis studi komparatif untuk menganalisis perbedaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di provinsi Sukabumi dan Bogor pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan pengendalian anggaran dan belanja daerah dengan membandingkan data pelaksanaan anggaran dua kabupaten.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, antara lain: Pemerintah Daerah: Hasil studi akan membantu pemerintah daerah mengevaluasi kinerja anggaran dan belanja mereka serta mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk masa depan. Komunitas: Penelitian dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana anggaran dan belanja daerah digunakan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah daerah. Jumlah peneliti: Hasil penelitian akan memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### **B. Jenis Data**

Dalam penulisan jurnal berjudul "Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor Tahun 2023", penulis menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka-angka yang tepat dan dapat diukur dengan menggunakan metode atau alat ukur tertentu. Data kuantitatif tersebut diperoleh melalui laporan keuangan terkait permasalahan yang diteliti, yaitu laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tahun 2023 yang mencakup dua laporan pendapatan dan belanja daerah. Dalam penelitian, data digunakan untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian.

### **C. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer, dalam hal ini Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, khususnya Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor,

yang menjadi subjek penelitian. Data yang digunakan berasal dari laporan pelaksanaan APBD tahun 2023, dan data sekunder ini berupa data time series yang mencakup pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.

#### D. Metodologi Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data diukur dalam skala numerik. Data yang digunakan adalah data sekunder. yaitu mengenai data yang ada digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik dengan menggunakan software SPSS. Sebelum menganalisis data, dilakukan uji asumsi klasik.

#### F. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik adalah yang distribusi datanya normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan memeriksa hasil plot histogram atau plot normal, atau dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2016: 252). Untuk menguji normalitas penelitian ini, penulis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Kriterianya adalah nilai Asymp. Sig. (2-tailed)  $\geq 0,05$  data berdistribusi normal.

#### G. Pengujian Hipotesis

##### Uji T untuk sampel independent (Independent Sample T-Test)

Uji T Sampel Independen mengacu pada metode uji T statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan satu sama lain. Istilah "independen" atau "bebas" menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau ketergantungan antara kedua sampel yang dibandingkan dengan menggunakan uji-t sampel independen ini. Uji-t sampel independen adalah jenis statistik inferensial parametrik yang digunakan untuk uji perbedaan atau perbandingan antara dua kelompok. Para peneliti dalam penelitian ini melakukan analisis uji-t sampel independen menggunakan perangkat lunak SPSS 24 for Windows. Untuk menguji hipotesis di atas apakah terdapat perbedaan yang signifikan realisasi pendapatan dan belanja daerah antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023, kami menggunakan uji Independent Sample T-test untuk menguji hipotesis tersebut.

$$H_0: \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$$

Pengujian dilakukan melalui uji independent Sampe T-Test dengan membandingkan nilai signifikansi (2-Tailed) dengan..... Apabila hasil perhitungan menunjukkan maka:

1. Jika nilai signifikansi (2-Tailed)  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak
2. Jika nilai signifikansi (2-Tailed)  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

#### Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)

Pengambilan kesimpulan hasil uji normalitas dapat dilihat:

1. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal
2. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka dinyatakan data berdistribusi tidak normal

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	569461.8567
Most Extreme Differences	Absolute	.192
	Positive	.192
	Negative	-.147
Test Statistic		.192
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa keempat variabel yang diuji berdistribusi normal.

#### Hasil Uji Hipotesis (Independent Sample T-Test)

Hasil uji t membandingkan ada tidaknya perbedaan signifikan data realisasi pendapatan daerah kabupaten Sukabumi dan kabupaten bogor tahun 2023.

H0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tahun 2023

H1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tahun 2023

Tabel 2. Group Statistics dan Independent Sampel Test

Group Statistics					
ANGGARAN PENDAPATAN		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PENDAPATAN	KABUPATEN SUKABUMI	13	128651961.5	172094164.7	47730333.46
	KABUPATEN BOGOR	13	275273723.1	322135164.5	89344219.49

Berdasarkan tabel output “Statistik Kelompok” di atas, terdapat 13 data pendapatan Kabupaten Sukabumi dan 13 data pendapatan Kabupaten Bogor. Rata-rata hasil Kabupaten Sukabumi tahun 2023 sebesar 128651961,5, sedangkan untuk Kabupaten Bogor sebesar 275273723,1. Analisis statistik memungkinkan kita menyimpulkan bahwa pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi pendapatan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Untuk menentukan

apakah perbedaan ini signifikan, Anda juga perlu menginterpretasikan hasil uji-t Sampel Independen berikut:

Tabel 3. Independent Sample T-test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
PENDAPATAN	Equal variances assumed	4.043	.056	-1.447	24	.161	-146621762	101294492.9	-355683320	62439796.61
	Equal variances not assumed			-1.447	18.334	.165	-146621762	101294492.9	-359156263	65912740.22

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh nilai *Sig. Levene's Test for Equality of Variance* sebesar  $0,56 > 0,05$  yang berarti *varians* data Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor bersifat homogen atau sama. Oleh karena itu, nilai "asumsi equal variance" termasuk dalam interpretasi tabel hasil uji sampel independen di atas.

Berdasarkan tabel keluaran "Independent Samples Test" pada bagian "Equal variances assumed", diketahui bahwa *Sig.(2-tailed)* sebesar  $0,161 > 0,05$ , dengan demikian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam *independent sample t-test* dapat ditentukan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam realisasi pendapatan kabupaten Sukabumi dan kabupaten Bogor tahun 2023.

Selanjutnya nilai "Mean Difference" adalah  $-146621762$ , seperti terlihat pada tabel hasil di atas. Angka tersebut merupakan selisih antara rata-rata hasil realisasi pendapatan kabupaten Sukabumi dan kabupaten Bogor, atau  $128651961.5 - 275273723.1 = -146621761.6$ , dan selisih antara perbedaan ini berkisar antara  $-359156263$  hingga  $65912740.22$  (95% Confidence Interval Selisih Bawah Atas).

Setelah dilakukan uji hipotesis pada realisasi pendapatan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tahun 2023, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis pada realisasi belanja/pengeluaran pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Uji T hasil perbandingan apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak dari data realisasi belanja daerah/pengeluaran pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tahun 2023.

H0 = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi pengeluaran Kabupaten Sukabumi 2023 dan Kabupaten 2023

H1 = Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengeluaran Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tahun 2023

Tabel 4. Group Statistics dan Independent Sampel Test

Group Statistics					
ANGGARAN PENGELUARAN		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PENGELUARAN	KABUPATEN SUKABUMI	13	125440315.4	155084949.7	43012826.03
	2	13	275115238.5	337170704.7	93514328.02

Berdasarkan tabel output “Statistik Kelompok” di atas, terdapat 13 data belanja pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Rata-rata realisasi belanja pemerintah Kabupaten Sukabumi sebesar 125440315,4 sedangkan rata-rata realisasi belanja pemerintah Kabupaten Bogor sebesar 275115238,5. Analisis statistik memungkinkan menyimpulkan adanya perbedaan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Untuk menentukan apakah perbedaan ini signifikan, juga perlu menginterpretasikan hasil uji-t Sampel Independen berikut:

Tabel 5. Independent Sample T-test

		Levene's Test for Equality of Variances				t-test for Equality of Means		95% Confidence Interval of the Difference		
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
BELANJA_DAERAH	Equal variances assumed	5.175	.032	-1.454	24	.159	-149674923	102932175.5	-362116492	62766645.82
	Equal variances not assumed			-1.454	16.860	.164	-149674923	102932175.5	-366980296	67630449.64

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai *Sig. Levene's Test for Equality of Variance* sebesar  $0.032 < 0.05$  yang menunjukkan bahwa varians data antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor adalah tidak homogen atau tidak sama. Akibatnya, nilai dalam “*Equal variances not assumed*” menginformasikan interpretasi tabel keluaran uji sampel independen di atas.

Berdasarkan tabel keluaran “Independent Samples Test” pada bagian “Equal variances assumed”, diketahui bahwa *Sig.(2-tailed)* sebesar  $0,164 > 0,05$ , dengan demikian sebagai dasar pengambilan keputusan dalam independent sample t-test dapat ditentukan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam realisasi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tahun 2023.

Selanjutnya nilai “Mean Difference” adalah -149674923, seperti terlihat pada tabel hasil di atas. Angka tersebut merupakan selisih antara rata-rata hasil realisasi pendapatan kabupaten Sukabumi dan kabupaten Bogor, atau  $125440315.4 - 27511238.5 = -149674923.1$ , dan selisih antara perbedaan ini berkisar antara -36698026 hingga 676304496.64 (95% Confidence Interval Selisih Bawah Atas).

**Pembahasan**

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi pendapatan Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Menurut teori statistik, dapat disimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol (H0) yang menyatakan bahwa realisasi pendapatan di kedua kabupaten adalah sama. Artinya berdasarkan data yang ada dan uji statistik yang dilakukan, perbedaan realisasi pendapatan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor tidak signifikan secara statistik.

Dengan kata lain, mungkin terdapat perbedaan pendapatan yang dihasilkan antara dua kabupaten, namun perbedaan tersebut tidak cukup besar untuk dianggap signifikan dari sudut pandang statistik. Artinya pendapatan kedua kabupaten pada tahun 2023 dianggap setara secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan realisasi pendapatan hasil antara kedua

kabupaten tersebut tidak cukup besar untuk dianggap signifikan. Dengan kata lain, fluktuasi pendapatan yang ada bisa saja terjadi secara acak atau tidak mempunyai signifikansi nyata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan di kedua kabupaten menunjukkan pengaruh yang serupa. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendasari realisasi pendapatan di kedua kabupaten mempunyai pengaruh yang relatif kuat. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk: Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh kedua pemerintah daerah mempunyai dampak serupa. Kebijakan perpajakan, retribusi, dan sumber daya keuangan lainnya dapat dirancang dan diterapkan dengan cara yang tidak menimbulkan dampak berbeda secara signifikan. Mengenai realisasi keuntungan di kedua kabupaten, struktur perekonomian kedua kabupaten ini serupa. Sektor-sektor utama perekonomian kedua wilayah, seperti pertanian, industri dan jasa, dapat memberikan kontribusi yang sama terhadap realisasi pendapatan. Status sosial ekonomi masyarakat di kedua kabupaten tersebut serupa. Tingkat pendapatan, pola konsumsi, dan tingkat kemiskinan kedua kabupaten mungkin tidak berbeda secara signifikan, sehingga mempengaruhi potensi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya pembahasan hasil uji sampel statistik independen untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan realisasi belanja Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor yang signifikan pada tahun 2023. Setelah dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik uji, hasilnya menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara realisasi pendapatan hasil Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor pada tahun 2023, maka menurut teori statistik dapat disimpulkan bahwa:

1. Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara realisasi pengeluaran pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023.
2. Karena nilai  $p$  (0,164) lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05, maka tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, perbedaan yang diamati dalam realisasi pengeluaran antara kedua kabupaten tidak signifikan secara statistik.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan belanja aktual yang signifikan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, namun bukan berarti belanjanya sama persis. Mungkin terdapat perbedaan kecil yang tidak signifikan secara statistik, namun perbedaan tersebut dapat dideteksi menggunakan kumpulan data yang lebih besar atau metode analisis yang lebih sensitif.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan realisasi pendapatan yang signifikan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Uji normalitas menunjukkan data berdistribusi normal dan nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05. Selain itu, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji Independent Samples T-test menunjukkan nilai Sig (two-tailed) sebesar 0,161 lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) ditolak. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan angka dalam realisasi pendapatan

antara kedua kabupaten/kota, perbedaan tersebut tidak cukup besar untuk dianggap signifikan dari sudut pandang statistik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pendapatan di kedua kabupaten mempunyai pengaruh yang serupa, hal ini disebabkan oleh kesamaan kebijakan fiskal, struktur ekonomi, dan kondisi sosial-ekonomi kedua kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dan kondisi perekonomian mempunyai dampak yang sama terhadap realisasi pendapatan di kedua kabupaten. Sedangkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Independent Samples T-test menunjukkan nilai Sig (two-tailed) sebesar 0,161 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis nol ( $H_0$ ).

Dengan kata lain, perbedaan realisasi belanja antara kedua kabupaten/kota tidak signifikan secara statistik. Rata-rata realisasi belanja pemerintah di Kabupaten Sukabumi sebesar 125.440.315,4 sedangkan di Kabupaten Bogor sebesar 275.115.238,5. Meskipun terdapat perbedaan antara angka-angka tersebut, namun secara statistik tidak signifikan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang signifikan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor pada tahun 2023.

## REFERENSI

- Aji Pangestu, D. (2022). *PENGARUH PENDAPATAN PREMI, HASIL INVESTASI DAN BEBAN KLAIM TERHADAP LABA*. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA JAKARTA.
- ANGGRAINI PATMIKO, S. D. (2016). *ANALISIS PENGHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 DENGAN METODE GROSS UP ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PT. X*. UNIVERSITAS ERLANGGA.
- BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT. (2023). *STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 2023*.
- Daling, M. (2013). ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *Jurnal EMBA*, 1(3), 82–89.
- Habiburrahman, & Imani, R. (2016). ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA BANDAR LAMPUNG ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET (APBD) BANDAR LAMPUNG. *JURNAL MANAJEMEN BISNIS*, 6.
- Heri Prasetyo, W., & Prativi Nugraheni, A. (2015). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1).
- Iqbal, M., Rachman, D., & Rodiah, S. (2021). PENGARUH RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12.
- Kurniasih Firi, V., Rasuli, M., & Alfiati, S. (2020). *PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2009-2012*. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)
- Rahman, Y., Asruni, & Yola. R. (2023). JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU. *JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS*, 37–59. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

- Shaladin Hermandi Dwi A, Deviyanti Dwi Risma, & Ratna Sari Wulan Iyhg. (2022). ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 7.
- Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(03).